



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,  
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan ke-	: III (tiga)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 2. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI 3. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI 4. Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI
Hari/Tanggal	: Selasa, 14 Februari 2023
Pukul	: 14.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR
Acara	: <b>Membahas peningkatan Literasi Nasional terkait indeks literasi berdasarkan Perpustnas RI dan UNESCO</b>
Hadir Komisi X DPR RI	: 39 dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. <b>Muhammad Syarif Bando</b> (Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) beserta jajarannya 2. <b>Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil, Ph.D.</b> (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI) beserta jajarannya

3. **Prof. Endang Aminudin Aziz, M.A., Ph.D.** (Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI) beserta jajarannya
4. **Dr.Ir.Subandi, M.Sc.** (Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI) beserta jajarannya

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.30 WIB oleh **Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Narasumber serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. UNESCO tidak menentukan indeks literasi untuk masing-masing negara, karenanya Perpustakaan Nasional RI menyusun indeks yang sudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
2. Dimensi indeks literasi masyarakat (ILM) 2020 meliputi (1) kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berperilaku berbahasa, (2) perilaku mengakses sumber informasi dan bahan bacaan, (3) perilaku memahami isi bacaan atau informasi, (4) perilaku mengemukakan ide atau gagasan dan (5) perilaku menciptakan kreasi atau mengembangkan produk/jasa bermutu.
3. Program prioritas nasional Perpustakaan Nasional RI antara lain adalah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

B. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penguatan literasi merupakan bagian penting dari tujuan kebijakan dan program-program merdeka belajar.

2. Standar kompetensi lulusan mencakup delapan domain karakter dan kompetensi yang esensial untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang modern, demokratis, dan majemuk.
3. Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan meliputi (1) evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan perlu mengukur kinerja berdasarkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar untuk mendorong pendidik dan Pemda memprioritaskan penguatan budaya literasi, (2) AN menghasilkan pemetaan literasi di tingkat satuan pendidikan dan daerah sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program dan kebijakan, (3) capaian literasi setiap satuan pendidikan dan Pemda disampaikan melalui platform Rapor Pendidikan sebagai umpan balik dan bahan perencanaan berbasis data.
4. Terkait kurikulum dan pembelajaran: (1) kurikulum merdeka mendorong pengembangan literasi sebagai kompetensi dasar melalui pengurangan materi dan fleksibilitas untuk menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, (2) penyederhanaan materi terbukti efektif untuk mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perkembangan kompetensi literasi dan numerasi, (3) kurikulum merdeka dikembangkan sejak tahun 2020 dan diterapkan secara bertahap.
5. Terkait kebijakan dan program perbukuan, maka penguatan budaya literasi perlu didukung kebijakan yang mendorong ekosistem perbukuan untuk menyediakan buku bermutu yang terjangkau di seluruh Indonesia.

C. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Program prioritas badan bahasa antara lain perlindungan bahasa dan sastra, literasi kebahasaan dan kesastraan, dan internasionalisasi bahasa Indonesia.
2. Literasi kebahasaan dan kesastraan yang baik dapat membantu anak meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui analisis dan interpretasi teks bacaan, buku bermutu dan berkualitas mendorong aktivitas membaca dan menulis. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan dilakukan melalui ketersediaan pilihan buku yang sesuai dengan jenjang pembacanya, dan pengutamaan bahasa negara dan pembinaan lembaga dapat meningkatkan citra profesionalisme.
3. Manfaat kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan antara lain meningkatkan kemampuan berbahasa, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan budaya, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan meningkatkan kemampuan berkreasi.
4. Peran buku dalam peningkatan kompetensi literasi antara lain berperan penting dalam peningkatan kompetensi literasi dan penumbuhan minat baca.

D. Pft. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pencapaian hasil PISA 2003-2018, tren capaian PISA mulai menunjukkan perbaikan di tahun 2015, namun di tahun 2018 mengalami penurunan capaian pada semua bidang yang diujikan. Pada tahun 2018, kemampuan literasi membaca mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan bidang tes lainnya yaitu mencapai 26 poin dan menjadi capaian terendah selama 15 tahun sebelumnya, lebih dari 50% siswa Indonesia masih memiliki kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains di bawah standar kompetensi minimum (di bawah level 2).
2. Nilai budaya literasi dari tahun 2018-2020 menunjukkan kenaikan, namun pada tahun 2021, capaian dimensi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimensi budaya literasi pada tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan karena menurunnya kunjungan perpustakaan yang merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yaitu 51,60% pada tahun 2020 menjadi 15,08 pada tahun 2021.
3. Arah kebijakan penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

E. Terhadap bahan dan paparan yang disampaikan oleh narasumber, Komisi X DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:

1. Mendorong Kemendikbudristek RI agar Kepala Perpustakaan Sekolah memiliki kompetensi dan penilaian kinerjanya sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana amanat UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan tidak hanya dinilai berdasarkan Permendiknas No.24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.
2. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk menambahkan indikator kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah sebagai bagian dari penilaian kinerja Kepala Sekolah.
3. Mendesak Kementerian PPN/Bappenas RI dan Kemendikbudristek RI untuk melakukan sinkronisasi/membuat regulasi agar Perpustakaan RI dapat memberikan dukungan pengelolaan dan pengembangan koleksi Perpustakaan Sekolah.
4. Mendorong Kemendikbudristek RI dan Bappenas RI agar penentuan indeks literasi tidak hanya merujuk kepada Unesco tetapi juga berdasarkan Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang dirumuskan oleh Perpustakaan RI.

5. Mendorong Kemendikbudristek RI dan Kementerian PPN/Bappenas RI agar pustakawan menjadi prioritas pengadaan tenaga kependidikan pada tahun anggaran yang akan datang berdasarkan peta kebutuhan pustakawan yang disusun oleh Perpunas RI.
6. Mendorong Kemenko PMK RI, Kemendikbudristek RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Perpunas RI bekerja sama dengan K/L lain yang memiliki program literasi untuk menyepakati lembaga yang akan memimpin pelaksanaan program-program literasi dan penyusun pedoman pelaksanaannya.
7. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kurikulum PAUD, agar pengenalan/penumbuhan budaya literasi tidak dimulai dengan membaca atau menulis namun melalui kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan mental anak.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.35 WIB

**KETUA RAPAT,**



**Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.**<sup>12</sup>